

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan *good governance*, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu syarat mutlak dalam pemenuhan tanggung jawab, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan berkelanjutan.

Mendukung pengelolaan BMN tersebut, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, wajib menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika c.q. Sekretaris Jenderal dengan ini melaksanakan PP tersebut sejak ditetapkan sebagai satu Kementerian dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Laporan Barang Pengguna Tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil kompilasi Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBPE1) dari seluruh Eselon I atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2017 sesuai dengan Perpres No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah terdapat kegiatan Revaluasi atas BMN khusus untuk aset Tanah, Bangunan dan Jaringan Irigasi dan Jalan (JIJ) yang secara keseluruhan sangat berpengaruh kepada perubahan Nilai atas BMN.

I.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

I.2. ENTITAS PELAPORAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo adalah Departemen/Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Bapak Rudiantara.

Visi

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp8.447.441.144.987,- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp8.409.663.403.677,00 dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.777.741.310,00 Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2018 merupakan himpunan dari LBKP pada 62 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 11 satker Kantor Pusat, 50 satker Kantor Daerah, dan 1 satker BLU.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB);
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel);
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

11. Laporan Revaluasi;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

LAPORAN BARANG

IV.1. TANAH

Saldo Tanah pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp5.031.594.268.110,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp4.768.208.630.950,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp271.601.357.160,-** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp8.215.720.000,-**.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	2,721,931	4,768,208,630,950
Mutasi Masuk		
- Transfer Masuk	27,033	8,083,870,000
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	5,344	2,730,160
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-	263,193,469,000
- Pengembangan Melalui KDP	1,200	321,288,000
B. Total Nilai Mutasi Masuk	33,577	271,601,357,160
Mutasi Keluar		
- Transaksi Normalisasi BMN	(27,033)	(8,083,870,000)
- Koreksi Pencatatan	(450.00)	(131,850,000)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(27,483)	(8,215,720,000)
D. Saldo per 31 Desember 2018	2,728,025	5,031,594,268,110
E. Nilai Buku Per 31 Desember 2018		5,031,594,268,110

IV.2. PERALATAN DAN MESIN

Saldo nilai perolehan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp2.146.630.406.292,-** Jumlah tersebut terdiri dari

saldo awal dengan nilai **Rp2.782.208.505.075,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp334.077.523.597,-** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp969.655.622.380,-** Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	2,782,208,505,075
Mutasi Masuk	
- Penambahan Saldo Awal	15,000,000
- Pembelian	77,835,211,360
- Transfer Masuk	65,200,630,070
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	73,751,383,433
- Pembatalan Penghapusan	1,557,686,640
- Reklasifikasi Masuk	66,910,474,038
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	3,674,478,099
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	34,579,875,924
- Pengembangan Nilai Aset	2,687,494,975
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1,003,092,674
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	6,844,759,484
- Pengembangan Melalui KDP	17,436,900
B. Total Nilai Mutasi Masuk	334,077,523,597
Mutasi Keluar	
- Transaksi Normalisasi BMN	(35,646,939,217)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(54,690,718,192)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(57,915,000)
- Penghapusan	(189,995,000)
- Transfer Keluar	(813,986,841,585)
- Reklasifikasi Keluar	(63,830,719,213)
- Koreksi Pencatatan	(1,089,178,323)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(163,315,850)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(969,655,622,380)
D. Saldo per 31 Desember 2018	2,146,630,406,292
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	1,434,297,408,422
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	712,332,997,870

IV.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp790.379.831.480,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai

Rp746.764.604.901,- mutasi tambah dengan nilai Rp58.879.582.244,- dan mutasi kurang dengan nilai Rp15.264.355.665-.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	746.764.604.901
Mutasi Masuk	
- Penambahan Saldo Awal	4.776.000.000
- Pembelian	197.295.725
- Transfer Masuk	3.951.082.000
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	6.286.611.480
- Reklasifikasi Masuk	10.024.541.499
- Pengembangan Nilai Aset	2.397.667.612
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	22.637.649.015
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	774.518.438
- Pengembangan Melalui KDP	7.392.654.475
- Koreksi Kesalahan Input IP	441.562.000
B. Total Nilai Mutasi Masuk	58.879.582.244
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(1.689.931.139)
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3.065.500)
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(1.573.612.071)
- Transfer Keluar	(9.452.334.955)
- Reklasifikasi Keluar	(680.072.000)
- Koreksi Pencatatan	(1.865.340.000)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(15.264.355.665)
D. Saldo per 31 Desember 2018	790.379.831.480
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	47.591.024.670
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	742.788.806.810

IV.4. JALAN DAN JEMBATAN

Saldo Jalan dan Jembatan pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai Rp8.822.920.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp9.537.497.000,- Mutasi tambah senilai Rp536.588.550,- dan mutasi kurang senilai Rp1.251.165.550,- .

Mutasi nilai jalan dan jembatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	9,537,497,000
Mutasi Masuk	
- Transfer Masuk	18,155,000
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	518,433,550
B. Total Nilai Mutasi Masuk	536,588,550
Mutasi Keluar	
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(1,102,126,550)
- Transfer Keluar	(18,155,000)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(130,884,000)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(1,251,165,550)
D. Saldo per 31 Desember 2018	8,822,920,000
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	2,914,682,270
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	5,908,237,730

IV.5. IRIGASI

Saldo Irigasi pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp3.067.899.000,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp3.104.289.268,-** mutasi tambah senilai **Rp150.371.572,-** dan mutasi kurang senilai **Rp186.761.840,-**.

Mutasi nilai aset tetap dalam renovasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	3,104,289,268
Mutasi Masuk	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tetap	147,748,576
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	2,622,996
B. Total Nilai Mutasi Masuk	150,371,572
Mutasi Keluar	
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(39,013,264)
- Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(147,748,576)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(186,761,840)
D. Saldo per 31 Desember 2018	3,067,899,000
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	269,728,922
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	2,798,170,078

IV.6. JARINGAN (131713)

Saldo Jaringan pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 sebesar **Rp16.551.896.954,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp15.319.957.426,-** mutasi tambah senilai **Rp1.549.361.878,-** dan Mutasi kurang senilai **Rp317.422.350,-**

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	15,319,957,426
Mutasi Masuk	
- Pembelian	8,647,200
- Transfer Masuk	122,015,350
- Reklasifikasi Masuk	1,223,292,328
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	195,407,000
B. Total Nilai Mutasi Masuk	1,549,361,878
Mutasi Keluar	
- Transaksi Normalisasi BMN	(195,407,000)
- Transfer Keluar	(122,015,350)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(317,422,350)
D. Saldo per 31 Desember 2018	16,551,896,954
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	4,001,843,992
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	12,550,052,962

IV.7. ASET TETAP DALAM RENOVASI

Saldo Aset tetap dalam Renovasi pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp26.602.891.152,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp20.814.096.385,-** mutasi tambah senilai **Rp35.474.233.685,-** mutasi kurang senilai **Rp29.685.438.918,-**.

Mutasi nilai aset tetap dalam renovasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	20,814,096,385
Mutasi Masuk	
- Pembelian	9,612,331,747
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	17,477,934,801
- Reklasifikasi Masuk	6,541,057,974
- Pengembangan Nilai Aset	1,842,909,163
B. Total Nilai Mutasi Masuk	35,474,233,685
Mutasi Keluar	
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(52,800,000)
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(747,588,125)
- Transfer Keluar	(11,071,052,655)
- Koreksi Pencatatan	(3,328,979,532)
- Reklasifikasi Keluar	(14,485,018,606)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(29,685,438,918)
D. Saldo per 31 Desember 2018	26,602,891,152
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	-
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	26,602,891,152

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi senilai **Rp26.602.891.152,-** terdapat pada satuan kerja sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	JENIS ATR	NILAI	Lokasi ATR	PEMILIK ASET YANG DIRENOVASI			KETERANGAN
					Intern K/L	K/L Lain	Swasta	
1	Set. KPI	Gedung dan Bangunan	87.071.350	Jl. Juanda Jakpus	-	87.071.350	-	Sekretariat Negara

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

2	Set. Ditjen SDPPI	Jalan, Irigasi, dan jaringan	612.095.000	Kem. Pariwisata	-	-	612.095.000	PT. Graha Lintas Prosperity
3	Set. Ditjen SDPPI	Aset Tetap Lainnya	4.989.197.250	Kem. Pariwisata	-	-	4.989.197.250	PT. Graha Lintas Prosperity
4	Dit. Kaminfo, Ditjen Aptika	Gedung dan Bangunan	735.336.236	Wisma BSG, Jl. Abdul Muis	-	-	735.336.236	PT. Dwibina Prima
5	Dit. Kaminfo, Ditjen Aptika	Gedung dan Bangunan	71.875.650	Menara Ravindo	-	-	71.875.650	PT. Ravindo Bandung Persada
6	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	274.754.797	Ranai	-	274.754.797	-	PT. SATRIA ARJUNA
7	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	77.994.950	PULAU BANYAK	-	77.994.950	-	CV. BERKAT PRIMA
8	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	18.949.700	PARAPAT	-	18.949.700	-	CV.TAKARI
9	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	73.087.000	SINTANG	-	73.087.000	-	PT. CAHAYA FAJAR
10	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	62.088.500	BOEPINANG	-	62.088.500	-	PT. DIAN PURNAMA
11	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	97.705.500	TAHUNA	-	97.705.500	-	CV. TARE MANDOLI
12	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	27.431.000	PASAMAN BARAT	-	27.431.000	-	PT. ANGGITA JAYA
13	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	35.871.584	SOE	-	35.871.584	-	CV. MERCURI
14	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	19.567.000	PUJUT	-	19.567.000	-	CV. BATU SELA
15	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	437.240.582	PULAU BANYAK	-	437.240.582	-	PT. SARANA GLOBAL
16	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	491.442.300	PARAPAT	-	491.442.300	-	PT. SARANA GLOBAL
17	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	310.466.937	PASAMAN BARAT	-	310.466.937	-	PT. SARANA GLOBAL
18	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	311.906.658	BENGGKAYA NG	-	311.906.658	-	PT. SARANA GLOBAL
19	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	363.384.633	SINTANG	-	363.384.633	-	PT. SARANA GLOBAL
20	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	434.657.631	SAMBAS	-	434.657.631	-	PT. SARANA GLOBAL
21	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	440.914.262	BOEPINANG	-	440.914.262	-	PT. REGENT SEMESTA
22	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	482.621.141	GUNUNG LOKA	-	482.621.141	-	PT. REGENT SEMESTA
23	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	605.891.687	MELAK	-	605.891.687	-	PT. SARANA GLOBAL
24	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	579.695.167	LIRUNG	-	579.695.167	-	PT. REGENT SEMESTA
25	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	528.764.983	TAHUNA	-	528.764.983	-	PT. REGENT SEMESTA
26	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	782.331.682	BINTUNI	-	782.331.682	-	PT. SARANA GLOBAL
27	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	629.567.481	SAUMLAKI	-	629.567.481	-	PT. SARANA GLOBAL
28	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	490.623.510	KEFAMENANU	-	490.623.510	-	PT. SARANA GLOBAL
29	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	412.726.864	SOE	-	412.726.864	-	PT. SARANA GLOBAL
30	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	432.487.128	PUJUT	-	432.487.128	-	PT. SARANA GLOBAL

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

31	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	530.627.688	Sarpras TVRI Malinau	-	530.627.688	-	PT.SARANA GLOBAL
32	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	389.838.961	Sarpras TVRI Waingapu	-	389.838.961	-	PT. Solitechmedia
33	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	2.266.240.914	Sarpras TVRI Tarempa	-	2.266.240.914	-	PT. Sarana Global
34	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	524.437.209	Sarpras TVRI Tanah	-	524.437.209	-	PT. Sarana Global
35	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	38.397.590	Waingapu		38.397.590		LPP TVRI
36		Aset Tetap Lainnya	195.319.600	Bintuni		195.319.600		LPP TVRI
37	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	36.743.630	Tarempa		36.743.630		LPP TVRI
38	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	6.208.636.712	Menara Merdeka	6.208.636.712			BAKTI
39	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	218.061.470	Wilker Surabaya	218.061.470			Wilker BAKTI
40	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	89.751.200	Tarempa		89.751.200		LPP TVRI
41	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	91.647.600	Dumai		91.647.600		LPP TVRI
42	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	108.806.940	Ranai		108.806.940		LPP TVRI
43	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	134.891.020	Ranai		134.891.020		LPP TVRI
44	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	89.163.580	Rote		89.163.580		LPP TVRI
45	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	92.890.875	Kobalima		92.890.875		LPP TVRI
46	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	92.890.875	Kefamenan u		92.890.875		LPP TVRI
47	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	92.890.875	Alor		92.890.875		LPP TVRI
48	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	105.517.500	Morotai		105.517.500		LPP TVRI
49	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	103.909.792	Dumai		103.909.792		LPP TVRI
50	BPPPTI	Aset Tetap Lainnya	84.583.620	Stasiun Transmisi Melak	-	84.583.620	-	PT. Penoon Jaya
51	Sekretariat Ditjen PPI	Gedung dan Bangunan	189.895.338	Gedung ITC Lantai 4	-	-	189.895.338	PT PPI (Persero)
			26.602.891.152		6.426.698.182	13.577.793.496	6.598.399.474	

IV.8. ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp21.593.200.584,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp21.476.096.774,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp896.390.650** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp779.286.840,-** Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	21,476,096,774
Mutasi Masuk	
- Pembelian	598,129,950
- Transfer Masuk	211,866,700
- Reklasifikasi Masuk	86,394,000
B. Total Nilai Mutasi Masuk	896,390,650
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(257,672,884)
- Transfer Keluar	(211,866,700)
- Reklasifikasi Keluar	(308,015,712)
- Koreksi Pencatatan	(1,731,544)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(779,286,840)
D. Saldo per 31 Desember 2018	21,593,200,584
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	368,160,615
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	21,225,039,969

IV.9. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (132111)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 sebesar **Rp742.732.400,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp7.013.851.417,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp99.550.842.072,-** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp105.821.961.089,-**

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

Mutasi nilai konstruksi dalam pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	7.013.851.417
Mutasi Masuk	
- Perolehan/Penambahan KDP	16.876.592.606
- Transfer Masuk KDP	183.367.400
- Pengembangan KDP	82.490.882.066
B. Total Nilai Mutasi Masuk	99.550.842.072
Mutasi Keluar	
- Koreksi Saldo Awal KDP	(1.132.000)
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	(97.515.929.714)
- Pengembangan Melalui KDP	(7.731.379.375)
- Koreksi Nilai KDP	(15.100.000)
- Penghapusan/Penghentian KDP	(375.052.600)
- Transfer Keluar KDP	(183.367.400)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(105.821.961.089)
D. Saldo per 31 Desember 2018	742.732.400
E. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	742.732.400

Saldo KDP senilai Rp742.732.400,- terdapat pada satuan kerja sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	Balmon SFR Kelas II Samarinda	188.115.000	Sudah diusulkan penghapusan KDP ke Menteri Keuangan sesuai Surat Menteri Kominfo Nomor B12/M.Kominfo/PL.02/02/2019 Tgl 10 Januari 2019
2	Balmon SFR Kelas II Manado	50.000.000	Disulkan Penghapusan Semester I 2019
3	Balmon SFR Kelas II Merauke	190.000.000	Disulkan Penghapusan Semester I 2019
4	Balmon SFR Kelas II Merauke	159.800.000	Disulkan Penghapusan Semester I 2019
5	Balmon SFR Kelas II Batam	21.450.000,	Sudah diusulkan penghapusan KDP ke Menteri Keuangan sesuai Surat Menteri Kominfo Nomor B36/M.Kominfo/PL.05/02/01/2019 Tgl 30 Januari 2019
6	Loka Monitor SFR Manokwari	133.367.400	Disulkan Penghapusan Semester I 2019
TOTAL		742.732.400	

IV.10. PERSEDIAAN

Saldo persediaan Tahun 2018 adalah **Rp7.442.895.214,-** yang terdiri dari:

Barang Konsumsi	6.024.744.458
Bahan untuk Pemeliharaan	95.684.726
Suku Cadang	77.258.144
Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	198.990.000
Bahan Baku	66.612.524
Persediaan Lainnya	979.605.362
Total Persediaan	7.442.895.214

Penjelasan Persediaan:

1. Persediaan peralatan dan Mesin untuk diserahkan ke masyarakat senilai **Rp198.990.000,-** pada satuan kerja IKP diserahkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

IKP	Peralatan dan Mesin	198.990.000	Usulan Penghapusan Semester I TA 2019
Total		198.990.000	

IV.11. SOFTWARE

Saldo Software pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp290.893.841.977,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp268.992.730.175,-** mutasi tambah senilai **Rp45.441.068.525,-** mutasi kurang senilai **Rp23.539.957.723,-**

Mutasi nilai software tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	268,992,730,175
Mutasi Masuk	
- Pembelian	10,866,138,449
- Transfer Masuk	1,531,722,787
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	6,898,451,980
- Reklasifikasi Masuk	7,857,410,946
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	67,430,000
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	768,617,000
- Pengembangan Nilai Aset	1,057,547,863
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	567,000,000
- Pengembangan Melalui KDP	15,826,750,500
B. Total Nilai Mutasi Masuk	45,441,069,525
Mutasi Keluar	
- Transaksi Normalisasi BMN	(768,617,000)
- Transfer Keluar	(1,531,722,787)
- Koreksi Pencatatan	(63,490,000)
- Penghentian Aset dan Penggunaan	(21,176,127,936)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(23,539,957,723)
D. Saldo per 31 Desember 2018	290,893,841,977
E. Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2018	254,489,403,871
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	36,404,438,106

IV.12. LISENSI

Saldo Lisensi pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai Rp70.730.187.104,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp70.418.054.404,- mutasi tambah dengan nilai Rp462.518.410,- dan mutasi kurang dengan nilai Rp150.385.710,-.

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	70,418,054,404
Mutasi Masuk	
- Pembelian	286,970,200
- Transfer Masuk	150,385,710
- Pengembangan Nilai Aset	25,162,500
B. Total Nilai Mutasi Masuk	462,518,410
Mutasi Keluar	
- Transfer Keluar	(150,385,710)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(150,385,710)
D. Saldo per 31 Desember 2018	70,730,187,104
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	-
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	70,730,187,104

IV.13. ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp1.257.044.301,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai **Rp8.469.973.029,-** mutasi tambah dengan nilai **Rp639.752.500,-** dan mutasi kurang dengan nilai **Rp7.852.681.228,-**

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	8.469.973.029
Mutasi Masuk	
- Pembelian	99.000.000
- Pengembangan Nilai Aset	540.752.500
B. Total Nilai Mutasi Masuk	639.752.500
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(276.624.580)
- Reklasifikasi Keluar	(6.313.256.648)
- Koreksi Pencatatan	(1.262.800.000)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(7.852.681.228)
D. Saldo per 31 Desember 2018	1.257.044.301
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	-
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	1.257.044.301

IV.14. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp21.847.981.152,-**. Jumlah tersebut terdiri atas :

a. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN YANG BERUPA ASET BERWUJUD

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional yang berupa aset berwujud pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai **Rp20.933.935.136,-** Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai

Rp22.872.004.573,- mutasi tambah dengan nilai Rp57.516.794.340,- dan mutasi kurang dengan nilai Rp59.454.863.777,-.

Mutasi nilai aset tetap berwujud yang tidak digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018	22,872,004,573
Mutasi Masuk	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	57,516,794,340
B. Total Nilai Mutasi Masuk	57,516,794,340
Mutasi Keluar	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(3,674,478,099)
- Transaksi Normalisasi BMN	(2,464,000)
- Penghapusan (BMN yang Dihentikan)	(3,512,470,898)
- Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola	(52,265,450,780)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	(59,454,863,777)
D. Saldo per 31 Desember 2018	20,933,935,136
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018	-
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018	20,933,935,136

b. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN BERUPA ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional pada Kementerian Kominfo Tahun 2018 senilai Rp914.046.016,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai Rp2.148.784.788,- mutasi tambah dengan nilai Rp21.472.552.516,- dan mutasi kurang dengan nilai Rp22.707.291.288. Mutasi nilai aset tetap tidak berwujud yang tidak digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Nilai Buku per 1 Januari 2018		2.148.784.788
Mutasi Masuk		
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	21.472.552.516
B. Total Nilai Mutasi Masuk	-	21.472.552.516
Mutasi Keluar		
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	(67.430.000)
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-	(22.639.861.288)
C. Total Nilai Mutasi Keluar	-	(22.707.291.288)
D. Saldo per 31 Desember 2018		914.046.016
E. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2018		-
F. Nilai Buku Per 31 Desember 2018		914.046.016

III. BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

V.1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Milik Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah sebesar **Rp8.447.441.144.987,-** yang terdiri dari intrakomptabel sebesar **Rp8.440.370.972.056,-** dan ekstrakomptabel senilai **Rp7.070.172.931,-**. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	9.092.895.214	100,00%		0,00%	9.092.895.214	100,00%
	Sub Jumlah (I)	9.092.895.214	100,00%		0,00%	9.092.895.214	100,00%
II	Aset Tetap						
	Tanah	5.031.594.268.110	100,00%		0,00%	5.031.594.268.110	100,00%
	Peralatan dan Mesin	2.146.630.406.292	99,84%	3.376.870.487	0,16%	2.146.630.406.292	100,00%
	Gedung dan Bangunan	790.379.831.480	99,99%	95.001.753	0,01%	790.474.833.233	100,00%
	Jalan dan Jembatan	8.822.920.000	100,00%		0,00%		100,00%
	Irigasi	3.067.899.000	100,00%		0,00%	3.067.899.000	100,00%
	Jaringan	16.551.896.954	100,00%		0,00%	16.551.896.954	100,00%
	Aset Tetap dalam Renovasi	26.602.891.152	100,00%		0,00%	26.602.891.152	100,00%
	Aset Tetap Lainnya	21.593.200.584	99,84%	35.125.000	0,16%		100,00%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	742.732.400	100,00%		0,00%	742.732.400	100,00%
	Sub Jumlah (II)	8.045.986.045.972	99,96%	3.506.997.240	0,04%	8.049.493.043.212	100,00%
III	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan pihak ketiga	-					
	Aset Tak Berwujud	363.795.119.398	100,00%		0,00%	363.795.119.398	100,00%
	Aset yang dihentikan Penggunaannya	21.847.981.152	85,98%	3.563.175.691	14,02%	25.411.156.843	100,00%
	Sub Jumlah (III)	385.643.100.550	99,08%	3.563.175.691	0,92%	389.206.276.241	100,00%
	TOTAL	8.440.722.041.736	99,92%	7.070.172.931	0,08%	8.447.792.214.667	100,00%

V.2. Perbandingan Antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan *	SELISIH
1	Persediaan	7,442,895,214	7,442,895,214	0
2	Tanah	5,031,594,268,110	998,225,868,635	4,033,368,399,475
3	Peralatan dan Mesin	2,146,630,406,292	2,146,630,406,292	0
4	Gedung dan Bangunan	790,379,831,480	739,117,374,472	51,262,457,008
5	Jalan dan Jembatan	8,822,920,000	11,789,961,516	-2,967,041,516
6	Irigasi	3,067,899,000	2,920,478,667	147,420,333
7	Jaringan	16,551,896,954	16,551,896,954	0
8	Aset Tetap dalam Renovasi	26,602,891,152	26,602,891,152	0
9	Aset tetap Lainnya	21,593,200,584	21,593,200,584	0
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	742,732,400	742,732,400	0
11	Aset tak Berwujud	362,881,073,382	362,881,073,382	0
12	Aset lain-lain **	21,847,981,152	20,621,187,552	1,226,793,600
	TOTAL	8,438,157,995,720	4,355,119,966,820	4,083,038,028,900

Selisih nilai dari Laporan Barang dengan Laporan Keuangan disebabkan kebijakan *Take Reval Out* dari Kementerian Keuangan.

*) Nilai Laporan Keuangan adalah gabungan dengan nilai aset BLU

***) Aset Lain lain adalah aset yang dihentikan dari operasional pemerintah

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

VI.1. Permasalahan BMN Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terdapat aset berupa tanah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masih bermasalah sebagai berikut:

1. Tanah di Sukmajaya, Depok :

Tanah milik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di Sukmajaya, Depok dengan Sertifikat Hak Pakai 4/Tirtajaya Tahun 1995 seluas ± 456.263 m² dalam perkara Perdata No. 161/PDT.G/1997/PN.BGR

telah mendapat putusan tetap di Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 588/PK/PDT/2002 yang dimenangkan oleh pihak Penggugat (H. Samin Cs.), dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*"inkracht"*) dengan luas \pm 332.234 m², serta telah memperoleh Surat Penetapan Eksekusi Ketua PN Bogor tanggal 10 September 2012, dan Surat Penetapan Eksekusi Ketua PN Depok tanggal 22 Februari 2013;

a. Bersamaan dengan perkara tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajukan gugatan pidana dengan terdakwa Udje S. dan Admin di Pengadilan Negeri Bogor dalam Perkara No. 139/Pid/B/2008/PN.BGR dan No. 140/Pid/B/2008 dengan dakwaan penggunaan bukti baru (*"novum"*) berupa surat palsu yang diajukan dalam persidangan Perdata di tingkat Peninjauan Kembali (PK) perkara No. 588/PK/PDT/2002, dimana pada tingkat PN Bogor oleh Hakim telah membebaskan para Terdakwa dengan amar putusan Bebas Murni. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (tidak melalui Banding) dan saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1554K/Pid/2009 dan No. 1556 K/Pid/2009 yang amarnya menyatakan bahwa para terdakwa Udje S. dan Admin terbukti telah menggunakan bukti berupa surat palsu/yang dipalsukan, dan keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*"inkracht"*). Perkembangan terakhir, atas putusan tersebut para terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bogor;

b. Pengadilan Tingkat Pertama di PN Depok :

Putusan PN Depok No. 165/Pdt.G/2011 PN.DPK tanggal 17 Desember 2012 yang amar putusannya pada intinya : Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (NO/Neit Ontvankelijk Verklaard);

c. Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung :

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 253/PDT/2013/PT.BDG, pihak Kementerian Kominfo dimenangkan, yang amar putusannya pada intinya:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b) Sertifikat Hak Pakai No. 4/Sukmajaya Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan RI adalah Sah;
- c) Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak penuh atas obyek tanah di lokasi;
- d) Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan tanah tanpa syarat.

d. Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI :

Pada tanggal 26 Agustus 2015 telah diterima salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 615 K/PDT/2014 yang amar putusannya pada intinya Menolak permohonan Kasasi I pihak Ahli Waris Alm. H. Muh. Samin dan Menolak permohonan Kasasi II pihak Udje S. Sehingga dalam hal ini pihak Kementerian Kominfo dimenangkan.

e. Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI :

Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, terdapat dua permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan oleh :

a) Rudi H.M Samin :

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Rudi H. Muhammad Samin (ahli waris Alm. H. Muhammad Samin) mengajukan upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) beserta Memori PK-nya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Depok. Pada tanggal 3 November 2015, Kementerian Kominfo telah menyampaikan Kontra Memori PK kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Depok. Berkas proses PK telah disampaikan/dikirimkan oleh PN Depok ke Mahkamah Agung pada tanggal 22 Januari 2016 sesuai surat No. W11.U21/301/HT.01.10/I/2016

b) Hartini Binti Udje S :

Pada tanggal 4 Februari 2016, Hartini binti Udje S (ahli waris Udje S) mengajukan upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) beserta Memori PK-nya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Depok.

- f. Pada tanggal 28 Maret 2016, Kementerian Kominfo telah menyampaikan Kontra Memori PK kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Depok. Berkas proses PK telah disampaikan/dikirimkan oleh PN Depok ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai surat No. W11.U21/1111/ HT.01.10/III/2016

Terkait dua permohonan PK tersebut di atas, Mahkamah Agung telah melakukan register perkara dengan Nomor : 333 PK/PDT/2016 sesuai surat pemberitahuan No. 16.333/333 PK/PDT/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Pada tanggal 1 September 2016, Majelis Hakim PK telah memutus Permohonan kedua PK tersebut di atas, dengan amar Putusan MENOLAK PERMOHONAN PK PARA PEMOHON PK (Kementerian Kominfo dimenangkan).

- g. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 ini akan melakukan Upaya Eksekusi terhadap Putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap ini. Adapun Pengajuan Upaya Eksekusi Pengosongan dengan Tahapan sebagai berikut:
- a) Surat Permohonan Penetapan Eksekusi atas Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung Nomor : 333 PK/PDT/2016, tanggal 1 September 2016 dari Sekretaris Jenderal kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;
 - b) Koordinasi Penetapan Eksekusi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (Biro Hukum bersama Konsultan Hukum).
 - c) *Aannmaning* Ketua Pengadilan Negeri Depok kepada Pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan secara sukarela.
 - d) Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Depok (dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela).

- e) Rapat Koordinasi dengan Mabes TNI, Polres Metro Depok, Polsek Sukmajaya, Satpol PP, berkaitan rencana Eksekusi setelah adanya surat penetapan eksekusi.
- h. Pada tanggal 27 Juli 2017, Rudi M. Samin (ahli waris Alm H. Muhamad Samin) kembali mengajukan upaya Hukum luar biasa Peninjauan Kembali Ke-2 (PK 2) beserta Memori PK-nya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Depok. Terkait hal tersebut, Kominfo telah menyerahkan Kontra Memori PK-2 ke MA melalui PN Depok pada tanggal 15 September 2017.

Dengan adanya PK-2, Ketua PN Depok menunda pelaksanaan Eksekusi hingga putusan berkekuatan hukum tetap sesuai surat No. W12.U21/4147/ HT.01.10/XI/2017 tanggal 6 November 2017. Saat ini dalam proses menanti penetapan *Aannmaning* Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Perkara PK Kedua telah diputus di Mahkamah Agung dengan Nomor 37 PK/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018, dengan amar putusannya menolak permohonan Rudi Samin (Kementerian Kominfo dimenangkan). Dengan putusan ini, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh dari pihak penggugat.

Saat ini Kominfo sedang menunggu salinan resmi putusan PK-2 dari Mahkamah Agung untuk selanjutnya memasuki tahapan eksekusi yang dahulu pernah ditunda PN Depok.

- i. Selain itu, selama gugatan melawan para ahli waris Alm. H. Muhammad Samin, telah dilakukan Gugatan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 161/PDT.PLW/2017/PN.DPK terhadap Kominfo oleh Gideon Salimun. Pada tanggal 7 Desember 2017, persidangan memasuki tahap Mediasi yang dinyatakan gagal karena para pihak yang hadir bertahan pada pendapat dan argumentasi masing-masing, dan penanganan perkara memasuki tahap pemeriksaan di Majelis Hakim.

- a) Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri (PN) Depok pada tanggal 12 Desember 2018 dan kemudian pada tanggal 9 Januari 2019, telah diputus dengan amar putusan menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya. Dalam hal ini Kemenkominfo menang.
- b) Pihak Pelawan akan mengajukan Banding dengan mengajukan alat bukti berupa Putusan PK MA Nor: 588 PK/PDT/ 2002 tanggal 22 September. Pada sidang Banding ini, Kementerian Kominfo akan menyusun Kontra Memori Banding dengan alat bukti tambahan berupa Putusan PK Nomor 37 PK/PDT/2018 jo. Nomor 253/PDT/2013/PT.BDG tanggal 27 Agustus 2013 yang intinya menyatakan bahwa Putusan PK MA Nor: 588 PK/PDT/ 2002 tanggal 22 September 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c) Saat ini Kementerian Kominfo menunggu pemanggilan resmi melalui surat Relas Panggilan Sidang.

2. Tanah di Jalan Raya Pasar Minggu, Duren Tiga, Jakarta Selatan :

- a. Permasalahan hukum atas tanah milik Kementerian Kominfo di jalan Raya Pasar Minggu, Duren Tiga, Jakarta selatan seluas 1.750 m², telah selesai, dan Kementerian Kominfo sebagai satu-satunya pemegang hak milik sesuai Putusan PN Jakarta Selatan No. 1071/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 April 2008. Namun saat ini masih terdapat pihak lain yang menduduki tanah tersebut, dan Kementerian Kominfo telah melakukan upaya mediasi untuk melakukan pengosongan tanah tersebut. Sebagai upaya pengamanan lebih lanjut, Kementerian Kominfo telah melakukan pemagaran dan pemasangan papan nama Kementerian Kominfo di lokasi tanah tersebut. Selain itu Kementerian Kominfo telah melakukan pengurusan sertifikat atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, namun masih terkendala dengan adanya pihak lain yang masih menduduki tanah

tersebut, sehingga pihak Kantor Pertanahan Jakarta Selatan belum dapat melakukan pengukuran.

- b.** Pada tanggal 28 Desember 2017, Persidangan memasuki tahap Mediasi dan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Januari 2018, sebagai tahap Mediasi Lanjutan.
- c.** Dalam rangka memperoleh nilai BMN yang Update Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pelaksanaan penilaian kembali pada aset Tanah BPPPTI oleh tim Kementerian Keuangan c.q KPKNL Jakarta V dan diperoleh penambahan nilai aset Tanah sebesar Rp.5.582.670.750,00.
- d.** Nilai Aset Tanah per 30 Juni 2018 sebesar Rp.17.825.151.750,00.
- e.** Perkara telah diputus pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak ada upaya hukum banding dari Penggugat.
- f.** Dalam penanganan perkara ini, langkah berikutnya adalah permohonan penetapan eksekusi atas tanah tersebut, dimana Biro Hukum Kominfo melimpahkan koordinasinya kepada BAKTI

3. Tanah di Jalan Medan-Belawan Km 7,9 Medan :

- a.** Tanah milik Kementerian Kominfo di jalan Medan-Belawan Km 7,9 Medan dengan sertifikat Hak Pakai, seluas 17.320 m², dalam perkara Perdata No. 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn berkaitan status kepemilikan, masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
- b.** Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan :
Putusan PN Medan No : 20/Pdt.G/2010/PN.MDN tanggal 15 Desember 2010, pihak Kementerian Kominfo dimenangkan, yang amar putusannya pada intinya : Menolak gugatan konpensi yang diajukan Penggugat Konpensi (Vincentius Setara Go dkk), dan Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan Kementerian Kominfo.
- c.** Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 149/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 23 Agustus 2011, pihak Kemnetrian Kominfo dikalahkan, yang amar putusannya pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tertanggal 15 Desember 2010

d. Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI :

Putusan Kasasi MA No : 2785 K/PDT/2012 tanggal 27 November 2013, pihak Kementerian Kominfo dimenangkan, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan bahwa :

- a) Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I (Vincentius Setara Go dkk), tidak dapat diterima.
- b) Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi III (Kantor BPN Kota Medan, Kasasi IV (Menkominfo d/h Menpen))

Dengan adanya putusan kasasi tersebut, Kementerian Kominfo d/h Departemen Penerangan adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa di jalan Medan-Belawan KM. 7.9 Medan.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Konsultan Hukum Kominfo di Medan (Mangiring Sihombing, SH), Kementerian Kominfo mengajukan Surat kepada Ketua PN Medan perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2785/Pdt/2012 dalam surat No. 1670/KOMINFO/SJ/HK.01.04/10/2015 tanggal 21 Oktober 2015. Menindaklanjuti surat permohonan tersebut, telah dilakukan audiensi antara Tim dari Biro Hukum bersama Biro Umum didampingi Pengacara Kominfo di Medan, dengan Juru Sita PN Medan, dan diperoleh keterangan bahwa tahapan dalam eksekusi yang harus dilalui adalah:

- a) Tahap Penetapan dan Pelaksanaan Aanmaning
- b) Tahap Penetapan dan Pelaksanaan Sita Eksekusi
- c) Tahap Penetapan dan Pelaksanaan Eksekusi di obyek sengketa.

- e. Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali:
- a) Kementerian Kominfo mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PN Medan.
 - b) Penanganan perkara perdata No. 412/PDT.G/2007/PN.MDN berkaitan erat dengan perkara No. 20/PDT.G/2010/PN.MDN terkait obyek tanah yang sama.
 - c) Pada tanggal 23 November 2016, Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 15/Eks/2016/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tanggal 28 Oktober 2016 yang pada intinya memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan terhadap tanah yang menjadi objek perkara.
 - d) Terhadap Penetapan Eksekusi tersebut, Kuasa Hukum Drs. Ahmad Fauzi Nasution, pada tanggal 18 November 2016 mengajukan Perlawanan/Bantahan Terhadap Penetapan Eksekusi Nomor: 15/Eks/2016/Pdt.G/2010/PN.Mdn, tertanggal 28 Oktober 2016.
 - e) Bantahan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut telah diproses di Pengadilan dengan nomor perkara 664/ PDT.Bth /2016/PN.MDN yang pada tanggal 22 Agustus 2017 telah diputuskan bahwa permohonan Bantahan tersebut ditolak, sehingga proses eksekusi pengosongan tanah dapat dilanjutkan.
 - f) Pada tanggal 4 September 2017 pihak Pelawan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara (PT Sumut) melalui PN Medan dengan penyampaian Memori Banding. Saat ini Kementerian Kominfo dalam posisi menunggu keputusan Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
 - g) Sehubungan telah adanya putusan tersebut, maka pelaksanaan eksekusi pengosongan masih tertunda karena ketidaksiapan aparat keamanan terkait adanya pelaksanaan pilkada 2018 di Sumut.

4. Tanah di Jalan Williem Iskandar No. 10 Medan Estate, Medan Tembung, Medan ;

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2014 terkait tanah Balmon SFR Kelas II Medan, disebutkan bahwa “Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Kemkominfo belum tertib”, yakni karena bukti kepemilikan tanah kantor Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Medan di Jalan Williem Iskandar No. 10 Medan Estate, Medan Tembung, Medan seluas 800 m² senilai Rp790.000.000,00 yang tercatat pada Ditjen SDPPI dikuasai oleh Akademi Pariwisata c.q. Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Aset tanah ini masih menjadi bagian dari sertifikat nomor 02.0426.18.4.00003 a.n Akademi Pariwisata c.q Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Asset tanah tersebut merupakan asset yang dahulu dimiliki oleh Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan berdasarkan KMK Nomor Kep-04/KM.6/WKN.02/KNL.01/2012 telah ditetapkan bahwa status penggunaan asset tersebut pada Kemkominfo.
- b. Sesuai informasi dari pihak Akademi Pariwisata (AKPAR), status tanah yang di dalamnya termasuk tanah Balmon SFR Kelas II Medan seluas 800 m² masih dalam proses pengadilan.
- c. Data dukung sebagai bukti kepemilikan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas tanah dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Menteri Keuangan No. S-831/MK/6/WKN.2/KNL.01/2010 tanggal 04 Juni 2012 tentang Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor SK.08/PL/402/Sekjen/KKP/2010 tanggal 01 Juli

2010 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Akademi Pariwisata Medan;

c) Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor PL.303/2/9/Sekjen/KKP/2010 dan Nomor 718A/SJ/KOMINFO/7/10 tanggal 5 Juli 2010.

d) Surat Sekjen Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata No. UM.001/44/11Ro.5/kkp/ 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penyampaian Berita Acara Serah Terima dan Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan BMN pada Akademi Pariwisata Medan.

e) Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Nomor SK.605/WKN.2/KNL.01/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Penyelesaian Dokumen Kepemilikan BMN berupa tanah yang akan ditetapkan penggunaannya.

d. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor pada tanggal 16 Desember 2016 telah melaksanakan rapat tentang Pembahasan penyelesaian status tanah kantor Balmon SFR Kelas II Medan dan Akademi Pariwisata dengan hasil sebagai berikut :

a) Direktorat BMN akan berkoordinasi dengan BPK terkait temuan hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pensertifikatan tanah

b) Direktorat BMN akan menanggapi surat dari Kementerian Pariwisata mengenai permasalahan pemecahan sertifikat

c) Kementerian Pariwisata membuat surat pernyataan mengenai alasan sertifikat induk tanah Akademi Pariwisata tidak dapat dilakukan pemecahan di BPN

d) Direktorat BMN merekomendasikan Kementerian Pariwisata untuk melakukan koreksi pencatatan luas dan nilai tanah sesuai dengan persetujuan alih status yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan c.q KPKNL Medan agar tidak terjadi pembukuan ganda (*double accounting*) di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- e. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/KN.2/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal Penyelesaian Status Tanah Kantor Balmon SFR Kelas II Medan dan Akademi Pariwisata Medan menyampaikan bahwa :
- a) Dengan adanya permasalahan hukum yang belum selesai, proses sertipikat dapat dilaksanakan setelah proses penyelesaian permasalahan hukum atas tanah diselesaikan dengan baik
 - b) Sebagian bidang tanah sertipikat Hak Pakai No.3/ Desa Medan Estate seluas 800 m² dikeluarkan dari daftar BMN Kementerian Pariwisata dan dicatat pada daftar BMN Kemkominfo serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan BMN dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara memadai
- f. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian sengketa tanah di Akademi Pariwisata Medan, Kementerian Pariwisata didampingi Kementerian Keuangan telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) pada tanggal 10 Maret 2017 di Medan, dengan kesimpulan :
- a) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan BPLP Medan (Akademi Pariwisata Medan) kepada PT Perkebunan Nusantara II (d.h. PTP IX) sebesar Rp38.126.400,00 tidak dibayarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II kepada pihak Yayasan Anugrah Putra Indonesia (YAPI).
 - b) Kementerian Pariwisata akan menyusuli surat Nomor KU.602/1/7/Sekjen Kem-Par/2015 tanggal 25 Mei 2015 kepada PTPN II dikarenakan adanya pergantian direksi pada PTPN II.

- c) Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK, PTPN II akan segera menjawab surat dari Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada poin ii di atas tentang klarifikasi pembayaran.
- d) Berkenaan dengan adanya 2 (dua) versi SK Gubernur Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor 590/2758k/89, tanggal 28 September 1989, Kepala Biro Hukum Pemerintah Sumut menyatakan bahwa diduga salah satu SK Gubernur tersebut adalah palsu namun perlu dibuktikan di laboratorium forensik. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenpar disarankan untuk mengirim surat kepada Pemprov Sumatera Utara guna menanyakan terkait adanya dua versi SK Gubernur Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara Nomor 590/2758k/89, tanggal 28 September 1989.
- e) Pihak Pemprov Sumatera Utara kesulitan untuk mencari dokumen yang dijadikan pembuktian dalam perkara dikarenakan dokumen yang terdokumentasi hanyalah yang berusia lima tahun terakhir;
- f) Saran dari pihak Pemprov terkait perkara tanah Akpar Medan adalah agar pihak pihak lain di luar yang berperkara membuat gugatan baru ke YAPI.
- g. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 10 Maret 2017, Kementerian Pariwisata telah mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor UM.303/7/21/SESMEN/ KEMPAR/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan ke PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) dengan surat Nomor UM.303/7/20/SESMEN/KEMPAR/2017 tanggal 30 Maret 2017
- h. Hingga saat Kementerian Pariwisata belum mendapatkan balasan dari Pemerintah Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II)
- i. **Tanah di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 22, Padang :**
- j. Adanya double input atas tanah seluas 300 m² dan 336 m² yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 22 dan ditempati oleh Kantor

Lokmon SFR Padang namun tercatat sebagai aset Kemkominfo c.q. Lokmon SFR Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat c.q. Bappedalda Provinsi Sumatera Barat.

- k. Telah dilaksanakan rapat antara Pemprov Sumatera Barat dengan Loka Monspekfrekrad Radio Padang pada tanggal 12 Juli 2012 dan dilakukan kembali rapat berikutnya pada tanggal 14 Juli 2012 mengundang juga Kementerian Keuangan dengan kesimpulan rapat :
- a) Pemerintah Sumatera Barat akan menghibahkan tanah yang digunakan oleh Loka Monspekfrekrad Padang Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Kota Padang setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika menyurati Pemprov Sumatera Barat terkait administrasi pencatatan aset tanah dimaksud dan permintaan dokumen sesuai prosedur yang berlaku.
 - b) Sesuai saran Kementerian Keuangan, agar ditindak lanjuti kesepakatan yang telah diputuskan pada rapat tanggal 12 Juli 2012 yaitu *“Untuk penyelesaian tanah kantor Loka Monspekfrekrad Padang Kemenkominfo, agar menyurati Pemprov Sumatera Barat untuk dapat menghibahkan tanah Sertifikat Hak Pakai No. 5 seluas 300 m² dan 336 m².”*
- l. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika), melalui Surat Nomor B-551/ M.KOMINFO/PL.04.03/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Pemindahtanganan Tanah yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, meminta agar Gubernur dapat *“memindahtangankan/menghibahkan aset tanah tersebut agar tidak terjadi double pencatatan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”*.
- m. Gubernur Sumatera Barat, melalui Surat Nomor 030/560/BPAD-III/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, menyatakan bahwa *“permohonan*

pemindahtanganan aset oleh Kementerian Kominfo RI dengan berat hati belum dapat kami pertimbangkan, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat membutuhkan aset tersebut dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat”.

- n. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) c.q. Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kemkominfo TA 2014, dalam surat Nomor 07/Tim LK-Kominfo/02/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Konfirmasi Status Aset Tanah, melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Akuntansi Provinsi Sumatera Barat atas hal-hal sebagai berikut:
- a) Apakah aset tanah tersebut tercatat dalam aset milik Provinsi Sumatera Barat? Jika ya, sejak kapan aset tersebut tercatat?
 - b) Apakah dokumen yang mendasari pencatatan aset tersebut (Jika ada, silakan melampirkan dokumen pendukung)
 - c) Berdasarkan penjelasan Ditjen SDPPI Kemkominfo bahwa pada tanggal 10 November 2014, Irjen Provinsi Sumatera Barat telah bertemu dengan Ditjen SDPPI Kemkominfo untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait aset tanah tersebut dan akan memanggil pihak Kemkominfo untuk mendiskusikan kembali tentang status aset tanah tersebut. Apakah sudah ada tindak lanjut Irjen Provinsi Sumatera Barat terkait hal-hal tersebut?.
- o. Hingga Februari 2016, Ditjen SDPPI belum menerima tembusan tanggapan/hasil konfirmasi dari Kepala Bidang Akuntansi Provinsi Sumatera Barat atas surat pada poin 1 tersebut.
- p. Pada tanggal 20 April 2017, Dirjen SDPPI telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat terkait penyelesaian asset tanah padang, hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :
- a) Pemprov. Sumatera Barat mencatat aset tanah seluas 636 m2 (sertifikat atas nama Depparpostel) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-60/A/2000 tentang Penghapusan Barang

Milik/Kekayaan Negara Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah, dan saat ini masih digunakan. Tanah seluas 636 m² yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman tersebut direncanakan akan digunakan untuk Bappeldalda (Dinas Lingkungan Hidup) sebagai Ruang Laboratorium dan Gudang.

- b) Pencatatan ganda atas aset tanah tersebut khususnya yang dicatat pada Kementerian Kominfo yang merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK, Gubernur Provinsi Sumatera Barat menyampaikan agar hal tersebut dapat diselesaikan secara internal Kominfo dengan BPK dan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkominfo karena hanya bersifat administratif, mengingat asset yang tercatat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan saat ini tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan BPK di Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- q. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembahasan internal terhadap solusi penggunaan tanah untuk keperluan kantor Loka Monitor SFR Padang dengan mencari alternatif tempat yang memungkinkan digunakan untuk kantor Loka Monitor SFR Padang.
- r. Gubernur Sumatera Barat melalui surat nomor: 030/37/BAP2BMD-III/II-2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Rekomendasi Gedung Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sumatera Barat, bermaksud menyediakan Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan luas bangunan 518 meter persegi berlokasi di Jalan Adinegoro Padang melalui mekanisme Pinjam Pakai selama 2 (dua) tahun untuk digunakan oleh Balmon SFR Kelas II Padang.
- s. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor: B-882/KOMINFO/SJ/PL.04.01/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, menyampaikan

tanggapan atas surat Gubernur Sumatera Barat dimaksud sebagai berikut:

- a) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas II Padang melalui monitoring dan pengendalian penggunaan frekuensi, perangkat telekomunikasi dan keamanan penerbangan di wilayah Sumatera Barat, sesungguhnya masih membutuhkan dan berharap dapat menggunakan gedung kantor yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 22 Padang (Gedung Lama)
- b) Gedung Kantor yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengganti Gedung Lama memerlukan perbaikan dan pembenahan sehingga belum dapat digunakan secara langsung dengan layak.
- c) Jangka waktu pinjam pakai selama 2 (dua) tahun terlalu singkat dan akan mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya pelayanan Balmon SFR Kelas II Padang, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika mengusulkan jangka waktu pinjam pakai menjadi 5 (lima) tahun.
- t. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Hibah BMN kepada Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/345/BAP2BMD-III/X-2018, tanggal 31 Oktober 2018, perihal Permohonan Hibah BMN.
- u. Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo melalui Setjen Kementerian Kominfo mengusulkan Hibah BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Balmon SFR Kelas II Padang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai surat Sekjen Kementerian Kominfo Nomor B1712/M.Kominfo/PL.04.03/12/2018, tanggal 05 Desember 2018, perihal Permohonan Ijin Hibah BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Balmon SFR Kelas II Padang

- v. Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengeluarkan persetujuan Hibah BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kementerian Kominfo, sesuai surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor S-21/MK.6/KN.5/2019, tanggal 09 Januari 2019, perihal persetujuan Hibah BMN berupa Tanah dan Bangunan pada Kementerian Kominfo
- w. Diinformasikan pula proses tindak lanjut persetujuan hibah tersebut, yakni penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kementerian Kominfo dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019

5. Daftar tanah dalam proses pembuatan sertifikat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No.	Satker	Lokasi	Permasalahan Tanah	Kuantitas
				(Bidang/m2)
1	Medan	Jl Wiliem Iskandar No.10 Medan Estate, Medan	Sertifikat belum dipecah menjadi a.n Pemerintah RI c.q Kementerian Kominfo. Masih satu induk dengan Kementerian Pariwisata	800
2	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No..22 Kota Padang	Sertifikat asli dikuasai Pemprov Sumatera Barat	636
3	Ambon	Jln. Tabea Jou RT.2 RW.5 Kel. Waihoka/Soya, Kec.Sirimau, Kota Ambon, Maluku Tengah	Saat ini Loka Ambon sedang berupaya menelusuri dokumen akta jual beli sebagai dokumen pendukung untuk pensertifikatan (Pemiliknnya sedang tidak berada di indonesia)	250
		Jl. Tabea Jou Karang Panjang Wailoka/Soya, Sirimay, Ambon	Setelah berkoordinasi dengan BPN terdapat kesalahan batas-batas tanah di sertifikat, kemungkinan BPN akan melakukan pengukuran ulang kembali (Pemiliknnya sedang tidak berada di indonesia)	420
4	Bandung	Kel. Antapani Kulon, Kota Bandung	Dalam Proses TPTGR	1000
5	Sekretariat Ditjen SDPPI	Blok E 11/04 Desa Citeureup, Kab.Bogor	Dalam proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Pemerintah RI cq Kementerian Komunikasi dan Informatika	120
6	Palembang	Jl. Sungai Rengas Rt 03/05 Kel.Pulo, Kec. Gandus, Sumatera Selatan	Dalam Proses Pembuatan Sertifikat	1213
7	Manokwari	Kel. Andai, Kec. Manokwari Selatan, Papua Barat	Dalam Proses Pembuatan Sertifikat	7155
8	BAKTI	Jl. Raya pasar Minggu, Kalibata, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Dalam Proses Pengosongan Lahan	1750

VI.2. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama hingga periode laporan Tahunan Tahun 2018, dapat disajikan sebagai berikut:

NO.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	Tahun Anggaran 2007	1.642.378.265.352	0	0
2	Tahun Anggaran 2008	1.993.023.264.986	350.644.999.634	21,35%
3	Tahun Anggaran 2009	2.516.053.685.847	523.030.420.861	26,24%
4	Tahun Anggaran 2010	2.866.597.183.490	350.543.497.643	13,93%
5	Tahun Anggaran 2011	3.201.546.693.564	334.949.510.074	11,68%
6	Tahun Anggaran 2012	3.418.836.173.468	217.289.479.904	6,79%
7	Tahun Anggaran 2013	3.691.468.753.870	272.632.580.402	7,97%
8	Tahun Anggaran 2014	3.456.462.448.270	(235.006.305.600)	-6,37%
9	Tahun Anggaran 2015	4.194.196.673.004	737.734.224.734	21,34%
10	Tahun Anggaran 2016	4.765.480.126.314	571.283.453.310	13,62%
11	Tahun Anggaran 2017	8.764.638.040.354	3.999.157.914.040	83,92%
12	Tahun Anggaran 2018	9.022.978.634.988	258.340.594.634	2,95%
13	Tahun Anggaran 2019	8.447.441.144.987	(575.537.490.001)	-6,38%

VI.3. Informasi Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses di Pengguna Barang (Kemkominfo)	11	-	16	5	32
2	Dalam Proses Pengajuan permohonan ke Pengelola Barang (Kemkeu)	1	-	7	2	10
3	Dalam Proses di Pengelola Barang (Kemkeu)	16	-	19	8	43
4	Proses di Pengelola Barang/ Pengguna Barang :	-	-	-	-	0
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	0
	b. Ditolak	-	-	-	-	0
	c. Disetujui oleh Pengelola Barang	47	3	50	13	113
	d. Disetujui oleh Pengguna Barang	-	-	48	6	54

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

5	Dalam Proses Tindaklanjut Pengguna/Kuasa Pengguna	-	-	23		23
6	Telah Terbit SK dari Pengguna Barang	50	-	81	24	155
7	Tindaklanjut oleh Kuasa Pengguna barang	-	-	-	-	0
8	Selesai serah terima	-	-	81	4	85
9	Gagal/Batal Proses	-	-	3		3
TOTAL		125	3	328	62	518

VI.4. Penyusutan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Adapun penyusutan dan amortisasi BMN berupa aset tetap Intrakomptabel pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dapat disajikan sebagai Berikut :

URAIAN	NILAI BMN	AK PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
TANAH	5,031,594,268,110	0	0	0	0	5,031,594,268,110
PERALATAN DAN MESIN	2,146,630,406,292	1,325,048,895,769	218,096,444,419	-108,847,931,766	1,434,297,408,422	712,332,997,870
GEDUNG DAN BANGUNAN	790,028,761,800	17,219,327,571	30,749,882,304	-378,185,205	47,591,024,670	742,437,737,130
JALAN DAN JEMBATAN	8,822,920,000	2,075,710,445	2,071,982,375	-1,233,010,550	2,914,682,270	5,908,237,730
IRIGASI	3,067,899,000	132,605,305	205,686,592	-68,562,975	269,728,922	2,798,170,078
JARINGAN	16,551,896,954	3,525,472,590	475,646,413	724,989	4,001,843,992	12,550,052,962
ASET TETAP RENOVASI	26,602,891,152	0	0	0	0	26,602,891,152
ASET TETAP LAINNYA	21,593,200,584	437,950,434	3,846,876	-73,636,695	368,160,615	21,225,039,969
SOFTWARE	290,893,841,977	236,005,609,422	33,736,336,511	-15,252,542,062	254,489,403,871	36,404,438,106
LISENSI	70,730,187,104	15,464,455,080	6,138,379,712	-13,323,750	21,589,511,042	49,140,676,062
ASET TAK BERWUJUD LAINNYA	8,469,973,029	0	0	0	0	8,469,973,029
ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN	914,046,016	2,064,104,843	52,354,700	-1,399,327,072	717,132,471	196,913,545
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	20,933,935,136	22,005,191,820	92,996,490	-3,140,332,949	18,957,855,361	1,976,079,775

VI.5. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data BLU dan informasi penyusutan satker BLU, dapat disajikan sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH		
	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
Barang Konsumsi	4,317,500	0	4,317,500
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	1,650,000,000	0	1,650,000,000
Tanah	17,825,151,750	0	17,825,151,750
Peralatan dan Mesin	254,788,419,574	-66,329,866,180	188,458,553,394
Gedung dan Bangunan	14,236,833,430	-383,595,745	13,853,237,685
Jaringan	3,295,172,000	-334,813,625	2,960,358,375
Aset Tetap dalam Renovasi	19,917,420,328	0	19,917,420,328
Aset Tetap Lainnya	100,217,850	0	100,217,850
Software	11,867,735,500	-4,873,200,814	6,994,534,686
Lisensi	1,586,637,500	-208,831,875	1,377,805,625
TOTAL	325,271,905,432	-72,130,308,239	253,141,597,193

VI.6. Perbandingan Antara Realisasi Belanja Modal Dan Penambahan Aset

Realisasi Belanja Modal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 230.327.472.716,-. Perbandingan antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Belanja Modal	230,327,472,716
Penambahan Aset	
Pembelian BMN Intra Komptable	99,503,724,631
Pengembangan Nilai Aset Berwujud	8,346,608,513
Pengembangan KDP	100,306,058,340
Penambahan KDP	21,786,618,812
Total Penambahan	229,943,010,296
Selisih	384,462,420
Penjelasan selisih	
Belanja Berang yang Menjadi Aset	1,369,410,990
Koreksi pencatatan KDP	15,100,000
Belanja Modal menjadi aset ekstrakomptabel	-231,266,110
Belanja modal tidak dicatat sebagai aset	-1,537,707,300
Total	(384,462,420)

VI.7. PNBPN Aset di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Akun.	Nama Akun	Nilai
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	417,982,187
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,684,952,028
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,426,345,208
4	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	522,068,000
Jumlah			4,051,347,423

VI.8. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahunan Tahun 2018

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, terdapat 6 temuan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

- Radio Komunitas sebanyak 51 set senilai Rp6.944.960.000 belum dihapus dari pencatatan
- Pencatatan identitas dan informasi asset pada SIMAK BMN belum sepenuhnya memadai
- Aset Rusak Berat belum direklas, masih disajikan sebagai aset tetap
- Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya (kesalahan kodefikasi, kesalahan kuantitas, asset senilai 1 rupiah, kurang saji dan kesalahan penyajian perhitungan penyusutan
- Ketidakkuratan perhitungan amortisasi ATB

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaporkan *progress* tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 terkait Barang Milik Negara posisi per Juli 2018 ke Kementerian Keuangan RI dengan form yang telah ditentukan (*terlampir*)

VI.9. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Perlu adanya peningkatan SDM khususnya pengelola penatausahaan BMN dan perhatian pimpinan satuan kerja untuk petugas SIMAK BMN agar tidak sering terjadi pergantian petugas SIMAK BMN dan petugas persediaan;
- b. Perlu adanya koordinasi antara petugas SIMAK BMN dengan petugas SAK untuk mempermudah pencarian dokumen sumber;
- c. Pelaksanaan Serah Terima Barang Hibah dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku (barang hibah diserahkan kepada penerima hibah sebelum persetujuan hibah terbit dari pengelola barang (Kementerian Keuangan)/pengguna barang (Kementerian Kominfo)

VI.10. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam proses penyusunan Laporan BMN.
- b. Melakukan peningkatan kompetensi petugas penatausahaan dan pelaporan BMN melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi dll.
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait dengan penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- d. Untuk mengatasi belum tertibnya penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu

dilakukan Inventarisasi BMN secara rutin oleh satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- e. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan penatausahaan BMN.
- f. Melengkapi atribut Barang Milik Negara dalam Aplikasi SIMAN dan SIMAK BMN.

VI.11.KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara, disampaikan bahwa hasil Penilaian Kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP 2018 (take reval out) dengan pertimbangan masih terdapat permasalahan terkait inventarisasi dan penilaian BMN yang menyakinkan BPK untuk memberikan simpulan awal belum dapat menerima hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018. Hasil Penilaian Kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.

Sehubungan dengan kebijakan pembatalan penyajian nilai aset tetap hasil penilaian kembali (take reval out) pada Laporan Keuangan Tahun 2018, Kementerian Kominfo telah melakukan koreksi pencatatan hasil Penilaian Kembali BMN.

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	391114	Revaluasi Aset Tetap	4.033.368.399.475	
059	131111	Tanah		4.033.368.399.475
059	391114	Revaluasi Aset Tetap	17.871.091.232	
059	133111	Gedung dan Bangunan		17.871.091.232
059	134111	Jalan dan Jembatan	2.967.041.516	
059	391114	Revaluasi Aset Tetap		2.967.041.516
059	391114	Revaluasi Aset Tetap	147.420.333	
059	134112	Irigasi		147.420.333

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

059	391114	Revaluasi Aset Tetap	172.658.595.566	
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		172.658.595.566
059	391114	Revaluasi Aset Tetap	6.409.393.157	
059	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		6.409.393.157
059	391114	Revaluasi Aset Tetap	798.295.167	
059	137312	Akumulasi Penyusutan		798.295.167

JURNAL BARANG BERLEBIH KL

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	34.582.270.000	
059	133111	Gedung dan Bangunan		34.582.270.000

I - JURNAL KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,329,800,840)	-
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(5,329,800,840)
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,502,784,101	-
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	2,502,784,101
059	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	122,756,400	-
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	122,756,400
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	679,819,410	-
059	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	679,819,410
059	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	(10,229,700)	-
059	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(10,229,700)
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	681,297,006	-
059	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	681,297,006

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

059	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(10,229,700)	-
059	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(10,229,700)
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,673,085)	-
059	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(18,673,085)
059	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(107,017,039)	-
059	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(107,017,039)
059	591312	Beban Penyusutan Irigasi	(533,538)	-
059	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	(533,538)
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.198.651	-
059	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	8.198.651

II - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (ASET TETAP)

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	133111	Gedung dan Bangunan	(191.680.718)	-
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(191.680.718)

III - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (PENYUSUTAN ASET TETAP)

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.373.264)	-
059	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(9.373.264)

IV - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	133111	Gedung dan Bangunan	91.497.600	-
059	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	91.497.600

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

Tahun 2018

(Audited)

059	133111	Gedung dan Bangunan	1.135.296.000	-
059	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	1.135.296.000

V - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.913.187	-
059	169122	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	19.913.187
059	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.163.904	-
059	169122	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	5.163.904

VI - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KD-BA	KD-PERK	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
059	169122	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	33.335.873	-
059	592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	33.335.873

Dari 62 Satker yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018, Satker yang melaksanakan Revaluasi Barang Milik Negara sebanyak 54 Satker. Terdapat 8 Satker yang tidak melaksanakan Revaluasi Barang Milik Negara yaitu :

1. Komisi Penyiaran Indonesia;
2. Komisi Informasi Pusat;
3. Dewan Pers;
4. Inspektorat Jenderal;

5. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
6. Sekretariat Ditjen IKP;
7. Museum Penerangan TMII;
8. Loka Tanjung Selor.

dikarenakan tidak memiliki aset tetap yang menjadi Objek Revaluasi Barang Milik Negara yaitu Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan.

Jakarta, 22 April 2019

Penanggung Jawab UAPB
Sekretaris Jenderal,


 Rosarita Niken Widiastuti

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
I.1. Dasar Hukum	2
I.2. Entitas Pelaporan	3

Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara	4
--	---

Pendekatan Penyusunan Laporan ...	4
--	---

Laporan Barang	6
IV.1. Tanah	6
IV.2. Peralatan Dan Mesin	6
IV.3. Gedung Dan Bangunan	7
IV.4. Jalan Dan Jembatan.....	8
IV.5. Irigasi.....	9
IV.6. Jaringan	10
IV.7. Aset Tetap Dalam Renovasi	11
IV.8. Aset Tetap Lainnya.....	14
IV.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan..	14
IV.10. Persediaan	15
IV.11. Software.....	16
IV.12. Lisensi	17
IV.13. Aset Tak Berwujud Lainnya	18

IV.14. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	18
---	----

Barang Milik Negara Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tahun 2018	20
---	----

V.1. BMN Per Akun Neraca.....	20
V.2. Perbandingan Antara Laporan Bmn Dengan Laporan Keuangan.....	21

Informasi BMN Lainnya	20
------------------------------------	----

VI.1. Permasalahan BMN Kementerian Komunikasi dan Informatika	20
VI.2. Perkembangan Nilai BMN	39
VI.3. Informasi Pengelolaan BMN ..	38
VI.4. Penyusutan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	39
VI.5. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum.....	40
VI.6. Perbandingan Antara Realisasi Belanja Modal Dan Penambahan Aset	40
VI.7. PNPB Aset di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	41
VI.8. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahunan Tahun 2018.....	41
VI.9. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	42
VI.10. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah	42
VI.11. Kebijakan Penilaian Kembali BMN	43



